

DAMPAK ADOPSI QRIS PADA UMKM SEKTOR *FOOD AND BEVERAGE* DI BANDA ACEH

Teuku Syifa Fadrizha Nanda

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
t.syifananda@ar-raniry.ac.id

Evriyenni

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
evriyenni@ar-raniry.ac.id

Rahmi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
180603313@student.ar-raniry.ac.id

Abstract

Advances in information technology have driven transformations in payment systems, and the COVID-19 pandemic serves as a catalyst for the financial services industry worldwide to accelerate shifts in payment systems toward cashless payment systems. Ironically, a preliminary study conducted among MSMEs in the food and beverage (F&B) sector in Banda Aceh indicated that utilization of QRIS is considerably low, with only 20% indicating that the intensity of customer transactions through QRIS is rated medium to high and 80% indicating low intensity. This phenomenon drove this study to investigate the impact and challenges associated with utilizing QRIS as an alternative payment system in the F&B industry in Banda Aceh. We investigated this issue employing a descriptive qualitative approach, and data was collected on MSME owners in the designated industry in Banda Aceh by performing observation, interviews, and documentation. Afterwards, the collected data were analyzed using Nvivo 12. According to the findings of this study, adopting QRIS in the payment system increases the ease of transaction, business operational efficiency, and rapid access to transaction data. However, the adoption of QRIS among MSMEs in (F&B) industry in Banda Aceh is relatively low. Some challenges in adopting QRIS have lagged interconnectivity between payment aggregators, disrupting the transaction process and delaying customer transaction payments. During hectic seasons such as weekends, national holidays, and religious holiday, the intensity of these technical obstacles frequently increases. Aside from that, public awareness and acceptance of electronic payment transactions remain low due to city dwellers' lack of digital financial literacy.

Keywords: QRIS, electronic payment, MSMEs.

Abstrak

Kemajuan teknologi informasi telah mendorong perubahan dalam sistem pembayaran, pandemi Covid-19 menjadi katalis bagi sektor keuangan secara global untuk mempercepat perubahan sistem pembayaran ke arah non-tunai. Ironisnya, survey pendahuluan yang dilakukan kepada pelaku UMKM pada industri *food and beverage* (F&B) di kota Banda Aceh mengungkapkan bahwa penggunaan QRIS masih sangat minim, hanya 20% yang menjawab bahwa intensitas transaksi pelanggan yang menggunakan QRIS pada kategori sedang hingga tinggi, sedangkan 80% dalam kategori rendah. Hal ini mendorong penelitian ini untuk mengkaji bagaimana dampak adopsi QRIS dan apa tantangan dalam adopsi QRIS sebagai sistem pembayaran alternatif pada UMKM industri F&B di Kota Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, pengumpulan data kepada pelaku UMKM industri F&B di Banda Aceh dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang dianalisis menggunakan Nvivo 12. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa adopsi QRIS pada sistem pembayaran meningkatkan kemudahan dalam bertransaksi, efisiensi operasional usaha, dan memberikan akses cepat ke data transaksi. Namun demikian, transaksi dengan menggunakan QRIS pada UMKM sektor F&B di Banda Aceh masih tergolong rendah. Adapun tantangan dalam adopsi QRIS adalah interkoneksi antar agregator pembayaran belum *real-time*, sehingga proses penyelesaian pembayaran (*settlement*) terganggu, dan dana atas transaksi pelanggan terlambat masuk ke rekening *merchant*. Intensitas kendala teknis ini meningkat pada saat *peak season*, seperti *weekend*, hari libur nasional, hari besar keagamaan. Selain itu, kesadaran dan penerimaan masyarakat untuk melakukan transaksi pembayaran secara elektronik masih rendah, hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat literasi keuangan digital masyarakat Kota Banda Aceh.

Kata kunci: QRIS, pembayaran elektronik, UMKM.

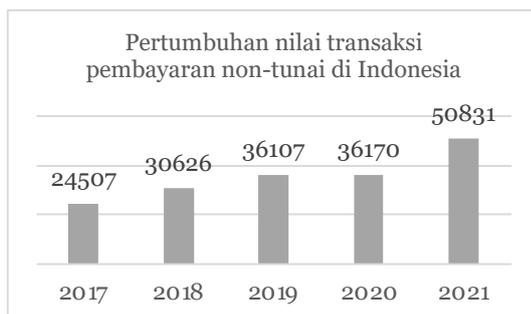
PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi khususnya pada layanan keuangan memungkinkan beragam

transaksi dijalankan dengan secara elektronik tanpa melakukan pertemuan atau kontak fisik secara langsung. Hal tersebut tidak lepas atas

adopsi teknologi kedalam sektor layanan keuangan sehingga dapat menyediakan berbagai layanan digital untuk memudahkan masyarakat dalam bertransaksi, salah satu implikasi dari adopsi perkembangan teknologi kedalam layanan keuangan transaksi yang tidak melibatkan uang fisik ataupun pembayaran non-tunai (*cashless payments*).

Pembayaran non-tunai memberikan banyak manfaat bagi penggunanya diantaranya: kenyamanan dalam bertransaksi karena mengurangi ketergantungan terhadap uang fisik dengan risiko yang melekat pada uang fisik, selain itu juga memungkinkan untuk diawasi untuk meminimalisir risiko kehilangan, efisiensi dan fleksibilitas dalam bertransaksi, serta dapat mendorong perkembangan ekosistem ekonomi digital.



Sumber: Data diolah (2023)

Gambar 1.
Data Pertumbuhan nilai transaksi pembayaran non-tunai di Indonesia

Pertumbuhan nilai transaksi pembayaran non-tunai di Indonesia yang dirilis dalam *the red book statistic 2022* oleh Bank Indonesia terus bertumbuh dari tahun ke-tahun. Salah satu jenis pembayaran non-tunai adalah QRIS. QRIS atau *Quick Response Indonesian Standard* merupakan inovasi pembayaran elektronik berbasis kode QR yang dapat diakses dan diproses oleh berbagai macam (universal) sistem pembayaran secara elektronik secara instan dan efisien.

QRIS merupakan program yang digagas dan dikembangkan oleh Bank Indonesia bersama

Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), yang secara resmi diluncurkan pada Februari 2020. Ini merupakan salah satu upaya dalam melaksanakan *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 untuk mempersiapkan ekosistem ekonomi dan keuangan digital di Indonesia. Selain itu, inisiasi QRIS oleh pemerintah Indonesia juga sebagai salah satu langkah strategis untuk meningkatkan inklusi keuangan, mendorong metode pembayaran non-tunai, dan memajukan ekonomi digital.

Pasca pandemi COVID-19 juga masih Indonesia untuk memberlakukan pembatasan sosial, kondisi ini pula yang mendorong pergeseran pembayaran dengan uang tunai ke pembayaran digital untuk menghindari atau membatasi terjadinya kontak fisik selama pandemi, dan hal ini pula yang mempercepat adopsi QRIS sebagai salah satu alternatif pembayaran elektronik di Indonesia. QRIS memungkinkan semua alat pembayaran baik dari lembaga keuangan maupun dari PJSP dapat dipakai pada seluruh gerai untuk menunjang operasional transaksi pembayaran non-tunai atau secara elektronik. Tata cara QRIS dalam mengaplikasikan pembayaran digital yaitu dengan melakukan scan QR Code yang kemudian dapat diidentifikasi atau dikenali oleh PJSP (Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran). Saat ini beberapa Perusahaan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sudah mendapat perizinan dari QRIS agar bisa melaksanakan pembayaran melalui QRIS (www.aspi-indonesia.or.id).

Bank Indonesia menetapkan QRIS dengan memberi izin operasi terlebih dahulu serta melakukan pengawasan pada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) termasuk diantaranya yaitu pada instansi bank syariah. Secara garis besar bank syariah merupakan tumpuan pertama dalam menjalankan seluruh kegiatannya dengan menerapkan prinsip bagi hasil, baik pada produk pendanaan, pembiayaan, maupun pada seluruh

produk yang dimiliki bank syariah. Disamping itu, produk bank syariah juga terbebas dari riba, maysir dan gharar (Ascarya, 2007:2). Keistimewaan skema bank syariah yang dijalankan dengan prinsip bagi hasil merupakan prefensi skema perbankan yang saling bermanfaat bagi bank dan masyarakat, serta mengutamakan perspektif keadilan dalam kegiatan bertransaksi, menonjolkan harkat-harkat persaudaraan dan kebersamaan dalam berproduksi, kegiatan investasi yang berakhlak dan menjauhi perbuatan spekulatif ketika bertransaksi keuangan. Adanya bermacam produk dan layanan jasa perbankan menggunakan skema keuangan yang lebih bervariasi, menjadikan perbankan syariah sebagai prefensi skema perbankan yang terpercaya dan bisa digunakan oleh semua kalangan masyarakat tanpa terkecuali (www.ojk.go.id).

Oleh karena itu ketersediaan QRIS pada bank syariah dapat dipastikan bebas dari unsur riba, terutama dalam melakukan kegiatan transaksi yang dimana saat ini perkembangan sistem perbankan syariah di Indonesia juga telah dijalankan dengan sistem perbankan ganda (*dual-banking system*) dalam kerangka dasar API (Arsitektur Perbankan Indonesia) guna menyediakan opsi jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia (www.ojk.go.id).

Dengan adanya layanan pembayaran digital QRIS yang salah satunya ikut dikembangkan oleh bank syariah, maka dapat berguna bagi inklusi keuangan syariah terhadap UMKM sehingga mempermudah akses UMKM menjadi semakin cepat dan gampang. Layanan QRIS saat ini telah terintegrasi dalam satu ekosistem pembayaran. Penjual dan pembeli di sektor UMKM tidak perlu berafiliasi dengan banyak PJSP (Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran) dalam platform mobile payment karena QRIS memiliki beberapa manfaat yaitu

efektif (dapat digunakan pada semua jenis *merchant*), dapat menerima pembayaran berbasis QR apapun, lebih praktis karena cukup menggunakan satu QRIS (www.qris.id).

Tidak hanya itu, saat ini kemudahan dan ragam fitur QRIS juga telah mendukung inklusi ekonomi dan keuangan digital serta konektivitas pembayaran antarnegara. Hal ini memberi keuntungan untuk semua pihak baik pengguna maupun pedagang, khususnya segmen UMKM. Sejak QRIS diluncurkan, Bank Indonesia telah melakukan berbagai macam langkah-langkah strategis untuk mengkampanyekan penggunaan QRIS secara menyeluruh. Quartal III 2023 Bank Indonesia melaporkan bahwa pengguna QRIS telah mencapai angka 40 Juta pengguna, 1,2 milyar volume transaksi dengan nilai transaksi sebesar 5 triliun Rupiah, dimana sebagian besar transaksi ini melibatkan pelaku UMKM di Indonesia. Lebih lanjut Bank Indonesia melaporkan jumlah *merchant* QRIS mencapai 28,3 Juta yang mana 91% nya adalah UMKM (www.bi.go.id).

Ironinya, hasil survey pendahuluan yang dilakukan kepada pelaku UMKM pada industri *food and beverage* (F&B) di kota Banda Aceh mengungkapkan bahwa intensitas penggunaan QRIS masih sangat minim, hanya 20% yang menjawab bahwa intensitas transaksi pelanggan menggunakan QRIS berada pada kategori intensitas sedang hingga tinggi, sedangkan 80% dalam kategori intensitas rendah. Oleh karenanya fenomena tersebut mendorong penelitian ini untuk mengetahui bagaimana dampak dan tantangan dari adopsi QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) pada UMKM Sektor penjual makanan dan minuman di Kota Banda Aceh.

METODOLOGI PENELITIAN

Studi ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif eksploratif dalam upaya menggali serta menguraikan seluruh informasi dan fakta yang berkenaan dengan tantangan-tantangan dalam

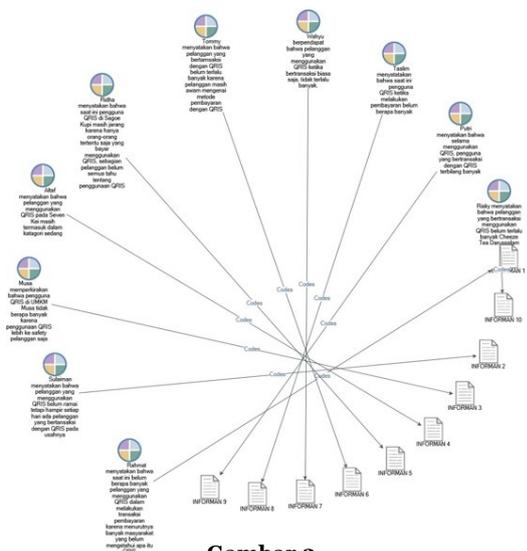
adopsi QRIS pada UMKM sektor F&B sebagai alternatif pembayaran atas transaksi-transaksi yang dilakukan pelanggan.

Perolehan data digunakan dengan melakukan wawancara (*in-depth interview*) kepada pelaku UMKM sektor F&B di Banda Aceh, selanjutnya peneliti juga melakukan observasi, dan studi dokumentasi terhadap transaksi-transaksi yang terjadi pada pelaku UMKM sektor F&B yang menggunakan QRIS sebagai alternatif metode pembayaran. Pengolahan data dilakukan menggunakan software *Non Numerical Unstructured Data Indexing Searching Theorizin* atau disebut dengan NVivo 12.

Adapun subjek penelitian ini yaitu pelaku UMKM pada industri F&B di Banda Aceh yang menerapkan QRIS sebagai alternatif metode pembayaran atas transaksi, yang terdiri dari 9 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang masing-masing merepresentasikan masing-masing kecamatan di Kota Banda Aceh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisa data melalui fitur *project map* Nvivo 12, kajian ini mengungkapkan beberapa dampak dan tantangan dalam adopsi QRIS sebagai sistem pembayaran alternatif pada UMKM Sektor *Food and Beverage* di Kota Banda Aceh, rinciannya dapat dilihat pada Gambar 2:



Gambar 2.
Hasil analisa melalui Nvivo

1. Dampak atas adopsi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) sebagai sistem pembayaran alternatif pada UMKM Sektor Food and Beverage Di Kota Banda Aceh;

Kemudahan bertransaksi

Hasil analisa dengan menggunakan NVivo 12 mengungkapkan bahwa QRIS memungkinkan operasional transaksi pembayaran secara elektronik, dimana untuk memproses pembayaran *merchant* hanya menunjukkan *barcode* dua dimensi atau dikenal dengan *Quick Response (QR) Code*, lalu pelanggan memindai QR code tersebut dan melakukan pembayaran secara elektronik melalui perangkat mobile masing-masing. Kondisi ini memungkinkan transaksi dilakukan secara praktis dibandingkan dengan metode konvensional atau pembayaran dengan uang tunai. Temuan ini senada dengan setiawan dan wahyuni (2020) bahwa QRIS dapat menjadi suatu alternatif pembayaran elektronik yang mudah digunakan, memudahkan transaksi pembayaran.

Keamanan Bertransaksi

Transaksi menggunakan QRIS tidak melibatkan penggunaan uang tunai, krn transaksi pembayaran diproses secara elektronik. Oleh karenanya risiko yang melekat pada transaksi secara konvensional yang melibatkan penggunaan uang tunai juga dapat dieliminir. Contohnya, risiko kehilangan uang baik karena tindak kriminal maupun karena *human eror*. Selain itu, transaksi dengan QRIS dapat membatasi dan menekan ruang gerak peredaran uang palsu, baik bagi pelaku usaha maupun pelanggan (masyarakat) dapat saling terhindari dari peredaran uang palsu yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak.

Sari dan Adinugraha (2022) juga menemukan hal yang sama bahwa bagi pelaku usaha, salah satu dampak dari adopsi yang dirasakan adalah keamanan dalam bertransaksi dimana dengan penggunaan transaksi secara

elektronik maka pelaku usaha dapat menghindari peredaran uang palsu.

Efisiensi Operasional Usaha

Transaksi yang dapat dilakukan secara praktis juga memberikan dampak dalam operasional bisnis pelaku usaha dalam mengelola transaksi, *merchant* tidak perlu lagi melakukan perhitungan uang tunai atas transaksi yang dilakukan, ataupun menangani kartu debit/kredit secara manual. Selanjutnya, penggunaan QRIS juga dapat mengeliminir proses persiapan uang kembalian, dan menghitung uang kembalian atas suatu transaksi yang terjadi, sehingga jumlah waktu untuk menyelesaikan suatu transaksi dapat dipersingkat. Hal ini didukung oleh temuan Sari dan Adinugraha (2022), bahwa salah satu dampak penggunaan QRIS adalah dapat menekan penggunaan uang kembalian sehingga pelaku usaha tidak perlu mempersiapkan uang kembalian untuk keperluan transaksi pembayaran dengan pelanggan.

Akses ke Data Transaksi

Penggunaan QRIS memungkinkan pelaku usaha untuk memiliki akses ke data transaksi mereka secara instan. Ini dapat mempermudah pelaku usaha dalam melakukan verifikasi dan pencatatan atas transaksi yang telah terjadi, sehingga dapat membantu tata-kelola usahanya menjadi lebih profesional. Hal ini dapat dilakukan karena laporan atas transaksi yang telah dilakukan dapat diakses langsung oleh *merchant* melalui aplikasi yang digunakan, tanpa harus mendatangi bank atau pihak penyedia layanan untuk mencetak mutasi kas di rekening mereka.

2. Tantangan-tantangan adopsi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) sebagai sistem pembayaran alternatif pada UMKM Sektor Food and Beverage Di Kota Banda Aceh.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat tantangan-tantangan dalam transaksi

dengan menggunakan QRIS pada UMKM sektor F&B di Banda Aceh, diantaranya:

Proses *settlement* cenderung memakan waktu

interkoneksi antar agregator selama proses pembayaran belum *real-time*, sehingga proses penyelesaian pembayaran (*settlement*) memakan waktu dan sering mengalami kendala teknis, dan dana atas transaksi pelanggan terlambat masuk ke rekening *merchant*. Intensitas kendala teknis ini semakin meningkat pada saat *peak season*, seperti *weekend*, hari libur nasional, hari besar keagamaan.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran di pihak pelaku usaha, kekhawatiran atas kepastian penerimaan dana atas transaksi yang telah dilakukan dengan pelanggannya. Proses *settlement* QRIS melibatkan serangkaian langkah untuk menyelesaikan proses transaksi pembayaran secara elektronik, dimana proses ini melibatkan penyedia layanan pembayaran atau agregator, Bank, dan pelaku usaha (*merchant*).

Proses ini dimulai dari terjadinya transaksi antara pelanggan dan *merchant*, dimana transaksi terjadi setelah pelanggan melakukan pembayaran transaksi melalui proses pemindaian kode QR. Selanjutnya, agregator atau penyedia layanan pembayaran QRIS berperan sebagai penghubung antara *merchant* dan pihak bank. Mereka mengumpulkan transaksi dari berbagai pedagang dan mengarahkannya ke sistem pembayaran. Agregator akan mengirimkan data transaksi ke bank atau lembaga keuangan yang terkait untuk dilakukan *settlement*. Informasi transaksi meliputi jumlah pembayaran, nomor rekening pedagang, dan data lainnya yang relevan.

Bank selanjutnya melakukan verifikasi transaksi dan menghitung total nilai transaksi yang terjadi melalui QRIS selama periode waktu tertentu. Proses *settlement* melibatkan transfer dana antara berbagai pihak yang terlibat. Dana

dari pelanggan akan ditransfer ke rekening pedagang melalui sistem pembayaran. Selain itu, biaya transaksi atau komisi akan dikenakan kepada *merchant* dan agregator. Setelah proses *settlement* selesai, pedagang biasanya menerima pemberitahuan atau laporan mengenai transaksi yang telah dilakukan proses *settlement*, termasuk informasi mengenai dana yang telah ditransfer ke rekening mereka.

Rangkaian proses ini cukup memakan waktu, dan tidak jarang terjadi kendala-kendala teknis yang disebabkan kendala infrastruktur pendukung baik di pihak *merchant*, penyelenggara layanan, maupun agregator, khususnya pada saat *peak season*, yang pada akhirnya menimbulkan kekhawatiran disisi pedagang. Kajian yang dilakukan oleh Kudu dkk (2023) juga mengungkapkan hal yang sama, bahwa proses *settlement* yang cukup memakan waktu sehingga lambatnya dana ditransfer ke rekening *merchant* menimbulkan kekhawatiran bagi pelaku usaha, dan tidak jarang mereka lebih memilih untuk melakukan transfer langsung atau menggunakan metode pembayaran lainnya.

Penerimaan dan resistensi masyarakat atas teknologi QRIS

Kesadaran dan penerimaan masyarakat untuk melakukan transaksi pembayaran secara elektronik masih rendah, hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat literasi keuangan digital masyarakat Kota Banda Aceh. Sejalan dengan Ginting (2021) bahwa tingkat literasi keuangan digital merupakan faktor penentu penerimaan masyarakat terhadap *electronic payments*, dan pada akhirnya dapat mendorong kesadaran masyarakat meminimalisir transaksi dengan uang tunai.

Kesuksesan adopsi QRIS sebagai alternatif pembayaran juga sangat bergantung pada penerimaan masyarakat terhadap metode pembayaran tersebut. Resistensi terhadap suatu metode pembayaran (teknologi) yang baru

merupakan hal yang lumrah terjadi, banyak faktor yang menyebabkan resistensi pengguna, baik dari sisi pelanggan maupun *merchant*, diantaranya:

- Edukasi pembayaran elektronik yang belum menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga tingkat literasi keuangan digital masyarakat Banda Aceh masih tergolong rendah dan pada akhirnya kesadaran untuk membiasakan transaksi non-tunai belum optimal;
- Terdapat aspek sosio-kultural pada individu masyarakat yang dapat menimbulkan resistensi dalam adopsi QRIS, hal ini berkenaan dengan kebiasaan pada perilaku masyarakat dalam menyimpan dan membawa uang tunai.
- Jumlah nominal transaksi yang rendah juga menyebabkan masyarakat enggan dalam melakukan transaksi dengan QRIS, karena transaksi yang dilakukan masih dapat di *cover* dengan uang tunai. Perilaku ini juga berkenaan dengan kebiasaan masyarakat yang sulit untuk diubah. Contohnya, jumlah transaksi personal pada sektor F&B umumnya berkisar di angka Rp 100.000,- dimana pelanggan lebih memilih untuk menggunakan uang tunai atas transaksi tersebut.

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Darmawan (2023) bahwa penerimaan teknologi dapat diintervensi oleh pengaruh pengetahuan dan juga *social norm* (norma sosial) pada masyarakat.

KESIMPULAN

Adopsi QRIS oleh pelaku UMKM sektor F&B di Banda Aceh dalam proses transaksi memberikan dampak dalam pengelolaan bisnis, diantaranya: kemudahan dalam bertransaksi,

efisiensi operasional usaha, dan akses ke data transaksi secara instan.

Disamping itu, terdapat beberapa tantangan dalam adopsi QRIS sebagai sistem pembayaran alternatif, diantaranya: Proses settlement yang memakan waktu sehingga dapat menimbulkan kekhawatiran para pelaku usaha, penerimaan masyarakat atas teknologi QRIS yang perlu ditingkatkan dengan membangun kesadaran masyarakat akan manfaat pembayaran secara elektronik, dan juga edukasi-edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi keuangan digital masyarakat.

REFERENSI

- Bank Syariah Indonesia. (2022). Pendaftaran QRIS. *Diakses* pada 05 Februari 2022, dari <https://www.bankbsi.co.id/promo/ayodaftar-qr>
- Bank Indonesia, Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah, *diakses* 11 Oktober 2023, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/pengelolaan-rupiah/default.aspx>
- Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 - Bank Indonesia: Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital, *diakses* 26 Desember 2022, <https://www.bi.go.id>
- Darmawan, Muhammad Rashif. (2023). Pengaruh Sosial, Persepsi Kemudahan, Kepercayaan dan Persepsi Risiko Terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Metode Pembayaran Cashless Pada Transaksi Pembayaran, *repository Universitas Islam Indonesia*
- Data UMKM Dinas Koperasi dan UKM Aceh. (2023). *Diakses* 03 Maret 2023, <https://dataumkm.acehprov.go.id/index.php/umkm>
- Firmansyah, A. (2017). Kajian Kendala Implementasi e-commerce di Indonesia. *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi*, 8(2), 127–136.
- Kudu, Y. U., Pakereng, Y. M., & Kelen, L. H. S. (2023). Efektivitas Penggunaan Payment Qris Pada Transaksi Penjualan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 3(2), 195-210.

- Hanim, L & Noorman, MS. (2018). *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha*. Semarang: Unissula Press.
- Mulkan Fadhli. (2019). *Teknologi Sistem Informasi: Perbankan, Komputerisasi, Sistem Informasi, E-Commerce, dan Tekfin*. Banda Aceh: Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Ubudiyah Indonesia.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Konsep Operasional Perbankan Syariah. *Diakses* pada 22 Juni 2023, dari <https://www.ojk.go.id/kanal/syariah/ten-tang-syariah/pages/konsep-operasional-PBS.aspx>
- Quick Response Indonesia Standard. (2022). Satu QR Code untuk semua Payment. *Diakses* 03 Agustus 2023, dari <https://www.qris.id/homepage/qr-program>
- QRIS.id. (2022). Skema Transaksi & Biaya Settlement QRIS. *Diakses* 03 Agustus 2023, dari <https://www.qris.id/homepage/qr-fee>
- Sari, A. C., & Adinugraha, H. H. (2022). Implementation of QRIS-Based Payments Towards the Digitalization of Indonesian MSMEs. *Ekonomika Syariah : Journal of Economic Studies*, 5(2). <https://doi.org/10.30983/es.v5i2.5027>
- Setiawan, I. W. A., & Mahyuni, L. P. (2020). Qris Di Mata Umkm: Eksplorasi Persepsi Dan Intensi Umkm Menggunakan Qris. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 921. <https://doi.org/10.24843/eeb.2020.v09.i10.p01>
- Uang Elektronik, *diakses* 02 Agustus 2022, <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Apa-itu-Uang-Elektronik.aspx>
- UMKM Bangkit Ekonomi Indonesia Kian Naik, *diakses* 01 Maret 2023, <https://www.medcom.id/foto/grafis/5b2mEY6N-umkm-bangkit-ekonomi-indonesia-kian-naik>.